



SURAT KETERANGAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
No. 472/C.02.01/LP2M/VII/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Dr. Tarsisius Kristyadi, S.T., M.T.
Jabatan : Kepala
Unit Kerja : LP2M-Itenas
JL. P.K.H. Mustafa No.23 Bandung

Menerangkan bahwa,

Nama	NPP	Jabatan
Dr. Sadar Yuni Raharjo, Ir., MT.	971004	Tenaga Ahli

Telah melakukan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat sebagai berikut :

Nama Kegiatan : Persepsi Stakeholders terhadap Manfaat (Outcome) Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah dalam rangka "Midterm Review Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah"
Tempat : Makassar
Waktu : 15 Mei 2018
Sumber Dana : Kementerian Agraria Tata Ruang/BPN

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandung, 18 Juli 2018

Lembaga Penelitian dan Pengabdian
kepada Masyarakat (LP2M) Itenas
Kepala,




Dr. Tarsisius Kristyadi, S.T., M.T.
NPP 960604

**LAPORAN KEGIATAN
PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**“PERSEPSI STAKEHOLDERS TERHADAP MANFAAT (OUTCOME)
PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DAN PENGUASAAN
TANAH” DALAM RANGKA MIDTERM REVIEW OUTCOME PROGRAM
PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DAN PENGUASAAN
TANAH**

Oleh :

Dr. Sadar Yuni Raharjo, Ir., M.T.

119971004



**LEMBAGA PENELITIAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
BANDUNG
2018**

HALAMAN PENGESAHAN

“PERSEPSI STAKEHOLDERS TERHADAP MANFAAT (OUTCOME) PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DAN PENGUASAAN TANAH” DALAM RANGKA MIDTERM REVIEW OUTCOME PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DAN PENGUASAAN TANAH

Pembuat Laporan,



Dr. Sadar Yuni Raharjo, Ir., M.T.
NIP. 119971004

Mengetahui
Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat



Dr. Tarsisius Kristyadi, S.T., M.T.
NIP. 119960604

FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)

**“Persepsi Stakeholders terhadap Manfaat (*Outcome*) Pengendalian
Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah”**

**Dalam rangka *Midterm Review Outcome* Program Pengendalian
Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah**

Makassar, 15 Mei 2018

**DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN
PEMANFAATAN RUANG DAN PENGUASAAN TANAH
TAHUN ANGGARAN 2018**

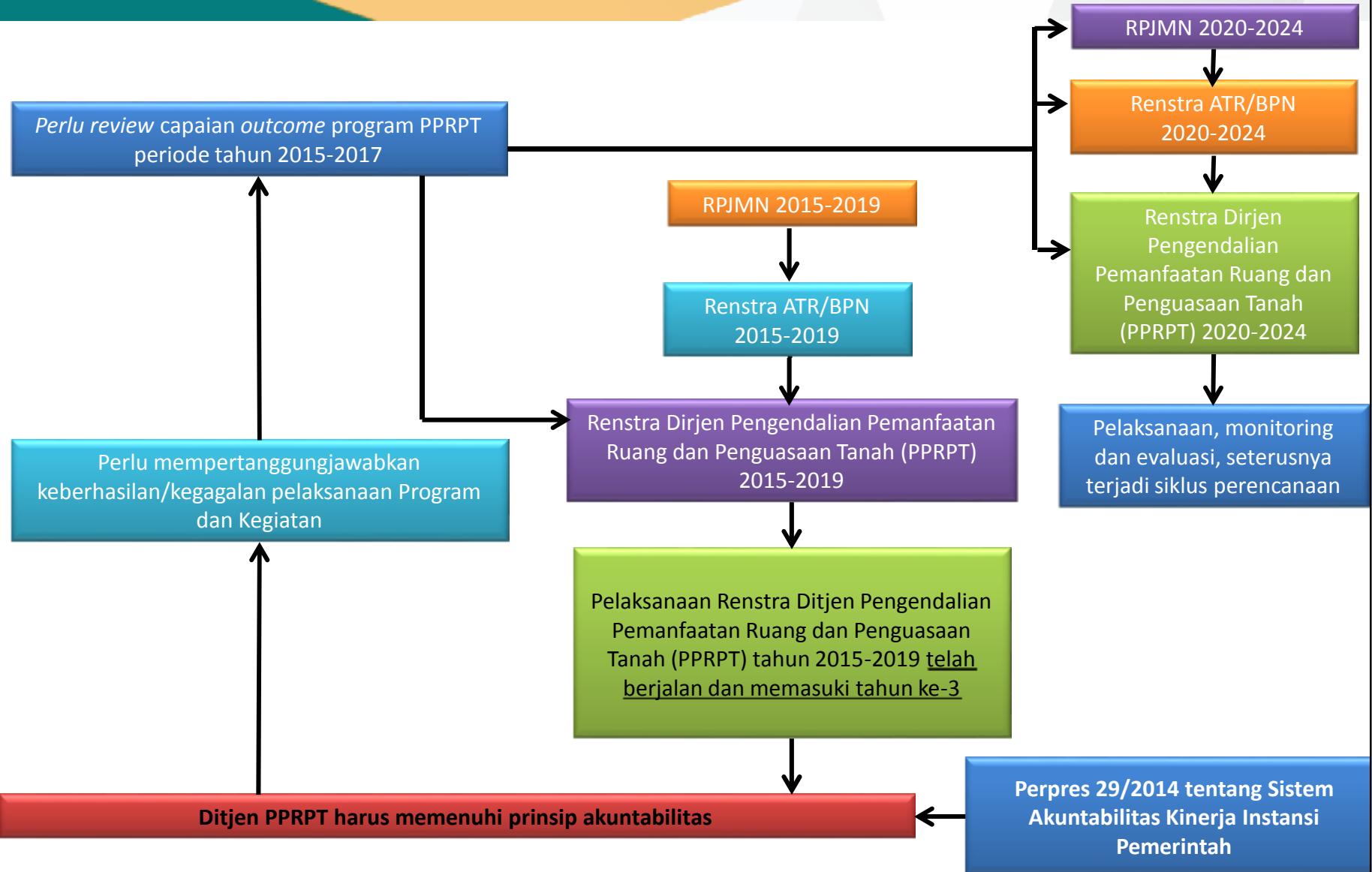
**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

Jl. Sisingamangaraja No. 2 - Kebayoran Baru - Jakarta Selatan - www.atrbpn.go.id





Latar Belakang



Isu Strategis



- Masih maraknya kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang
- dan peraturan perundang-undangan
- Konflik antar sektor dan sengketa kepemilikan lahan
- Belum efektifnya upaya pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang serta Pemantauan dan Pengendalian Pertanahan
- Banyaknya kasus tanah terlantar yang belum dimanfaatkan dan ditindaklanjuti sesuai dengan ijin peruntukannya
- Terbatasnya SDM/Aparatur untuk kegiatan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang
- Belum Lengkapnya Instrumen Dasar Atau Aturan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK)
- Perlu pelibatan dan pendayagunaan masyarakat dan dunia usaha dalam kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang
- Belum jelasnya struktur kelembagaan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang
- Ketimpangan penguasaan tanah di Indonesia
- Banyaknya pelanggaran terhadap pemenuhan kewajiban pemegang Hak Atas Tanah (HAT)
- Belum efektifnya pengendalian dan pemantauan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B)
- Belum optimalnya pendayagunaan Tanah Cadangan Umum Negara (TCUN)



Maksud dan Tujuan

Maksud

Mengukur manfaat dari program pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah di stakeholder melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Ditjen PPRPT dalam kurun waktu 2015-2017.

Tujuan

- **Mengukur secara komprehensif tingkat keberhasilan Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah melalui persepsi dan tingkat kepuasan stakeholders baik stakeholder kunci, primer dan sekunder bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah.**
- **Menjaring masukan dari stakeholder terkait peningkatan program Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah.**
- **Melakukan evaluasi program Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah dalam jangka menengah (*midterm review*) pada kurun waktu 2014-2019 sehingga kualitas program untuk tahun-tahun berikutnya semakin membaik.**



Sasaran

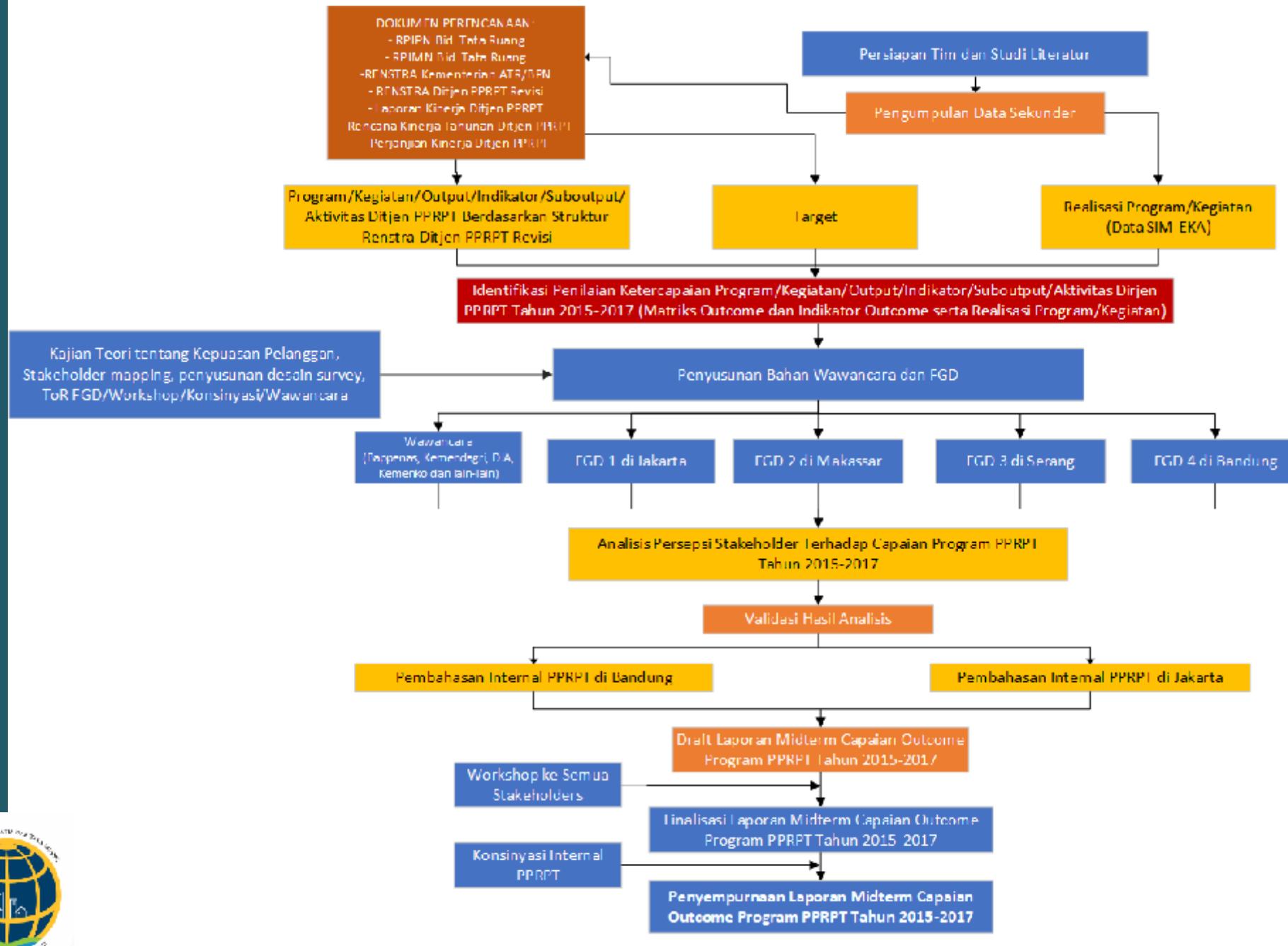
- 1 Memvalidasi pengukuran Kinerja Utama penyelenggaraan program pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah yang telah dilaksanakan selama kurun waktu 2015-2017 di masyarakat
- 2 Mengetahui kelemahan atau kekuatan program Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah yg telah dilaksanakan selama kurun waktu 2015-2017
- 3 Teridentifikasinya dan terinformasikannya capaian outcome program Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah dalam kurun waktu 2015-2017
- 4 Tersusunnya bahan masukan Penyusunan kebijakan Renstra Ditjen PPRPT untuk kerangka 2020-2025 tahun berikutnya
- 5 Memberi masukan untuk pencapaian RPJMN III 2015-2017 khususnya Tahun 2019



Manfaat

- **Sebagai dasar untuk menilai keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Direktorat Jendral Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah.**
- **Teridentifikasinya permasalahan dan terlaksananya tindakan korektif terhadap pencapaian kinerja 2015-2017 menjadi umpan balik serta pendorong perbaikan pencapaian kinerja tahun berikutnya.**
- **Terinformasikannya pencapaian kegiatan Direktorat Jendral Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah 2015-2019 selama tahun anggaran kepada stakeholder terkait.**
- **Meningkatkan akuntabilitas kinerja Direktorat Jendral Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah.**

Kerangka Pikir





Definisi Operasional

- **Persepsi stakeholders** adalah suatu kesan yang dirasakan dan dipikirkan berdasarkan hasil pengamatan, penalaran dan pengalaman terhadap suatu keterlibatan dan atau penerima manfaat program/kegiatan PPRPT.
- **Stakeholders PPRPT** didefinisikan sebagai pihak-pihak terkait yang mempunyai kepentingan dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran PPRPT, serta terkena dampak secara langsung maupun tidak langsung program/kegiatan PPRPT
- **Stakeholders internal:** stakeholders di dalam Ditjen PPRPT, ATR/BPN
- **Stakeholders eksternal:** di luar Ditjen PPRPT, seperti kelompok masyarakat, akademisi, NGO/LSM, OPD, K/L, dll



Definisi Operasional

Jenis Stakeholders:

- 1. Stakeholders langsung**, yaitu stakeholders yang terlibat dan mempunyai kepentingan, pengaruh, tanggung jawab dan memanfaatkan secara langsung dalam setiap proses kegiatan program dan proyek atau suatu kebijakan PPRPT.
- 2. Stakeholders tidak langsung**, yaitu stakeholders yang hanya terlibat pada beberapa kegiatan tertentu saja dalam proses kegiatan program dan proyek, dan tidak mempunyai kepentingan, pengaruh, dan tanggung jawab secara langsung dalam suatu kebijakan/Program/kegiatan PPRPT.



Metode Peneltian

- Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif (*mixed methods*).
- *Mixed methods research* fokus pada pengumpulan dan analisis data yang memadukan antara pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif.
- Dalam metode kuantitatif, pengambilan data menggunakan kuisioner,
- Dalam metode kualitatif, pengambilan data menggunakan FGD, wawancara semi terstruktur dan studi pustaka,
- Analisis data menggunakan statistik deskriptif, indeks kepuasan pelanggan, *Important Performance Analysis* dan radar diagram (*radar chart*).



Lokasi Studi





Metode Analisis

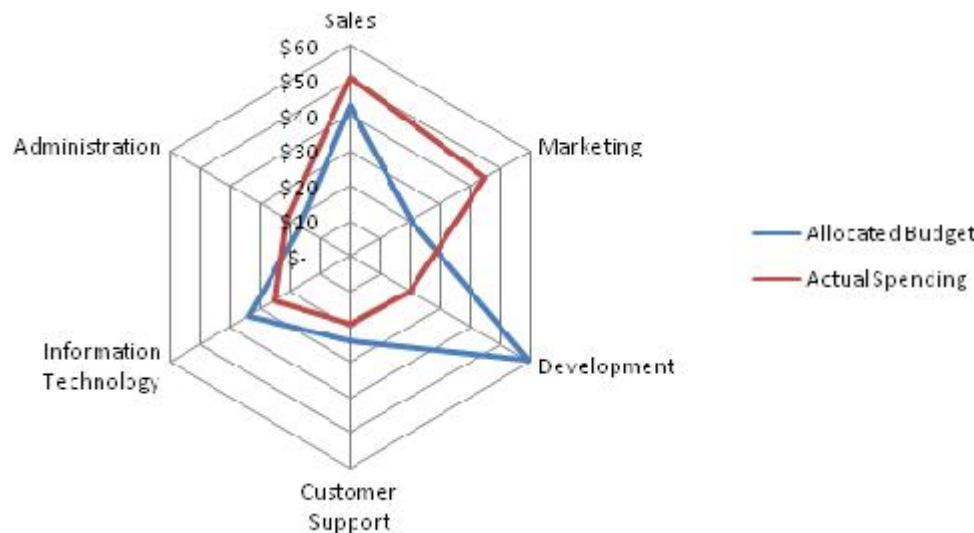
1. Analisis Deskriptif. mendeskripsikan data untuk mengidentifikasi stakeholders terkait PPRPT.
2. Analisis Indeks Kepuasan Masyarakat. Sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas atau manfaat (outcome) dari produk-produk dan layanan yang dihasilkan oleh program/kegiatan PPRPT.

Metode Analisis Statistik Deskriptif

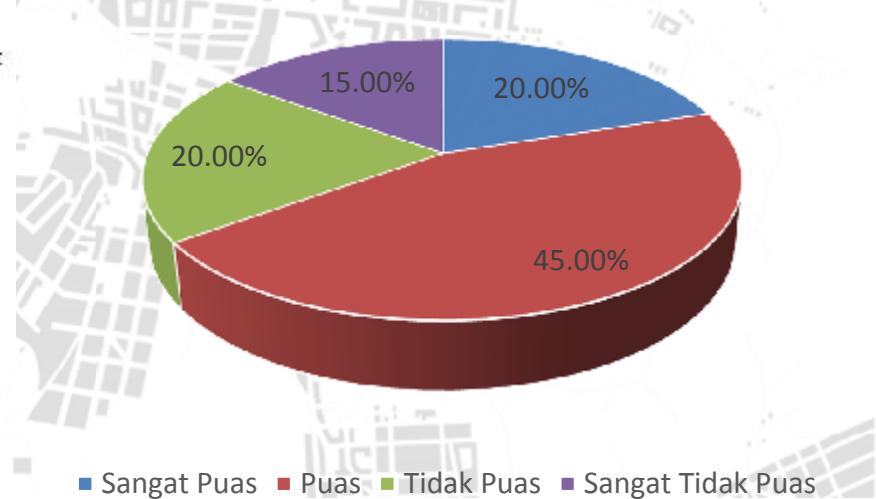
Contoh Penyajian Statistik Deskriptif

Tujuan:

menggambarkan karakteristik responden dan deskripsi persepsi responden.



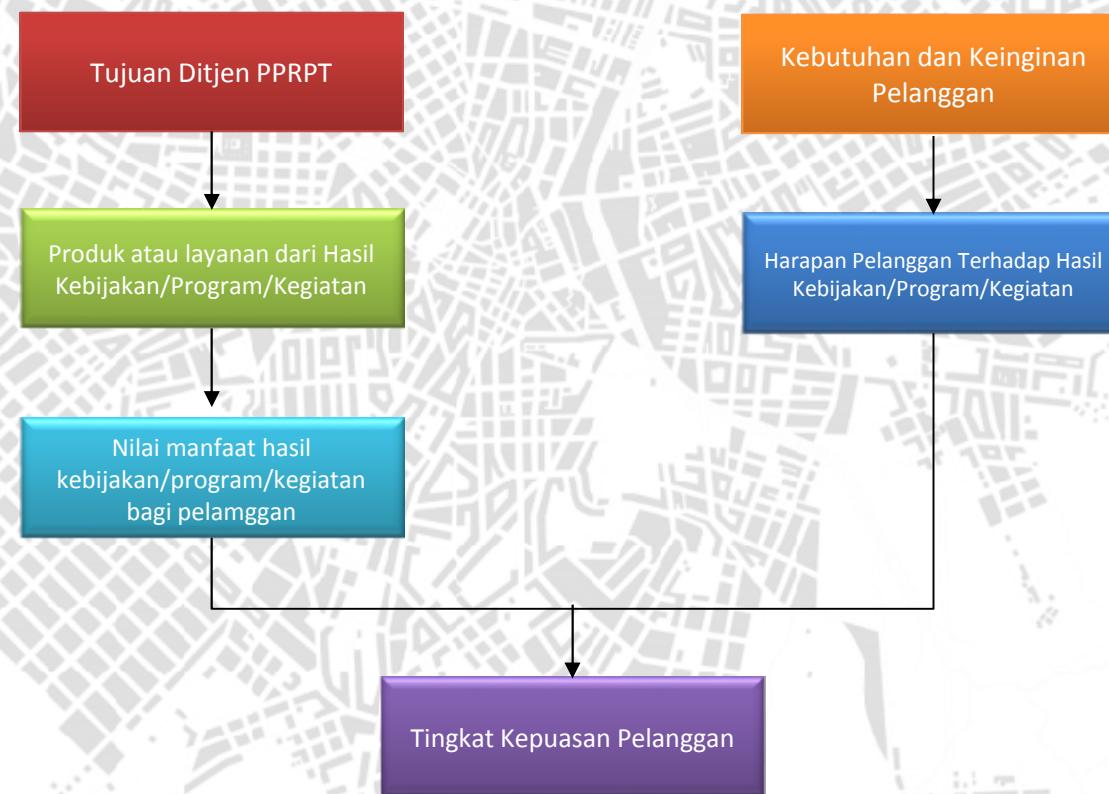
Kepuasan	Frekwensi (f)	Prosentase (%)
Sangat Puas	4	20
Puas	9	45
Tidak Puas	4	20
Sangat Tidak Puas	3	15
	N=20	100



Adposi Metode Indeks Kepuasan Pelanggan



Kotler-Keller dalam Alma (2005:117) meliputi kinerja yang diharapkan konsumen dan harapan konsumen, jika kinerja produk/jasa berada dibawah harapan, maka pelanggan akan merasa tidak puas, apabila kinerja melebihi ekspektasi, maka pelanggan merasa amat puas atau senang.



Gambar Konsep Kepuasan Pelanggan

Metode Indeks Kepuasan Stakeholders terkait PPRPT



- Diadopsi dari metode indeks kepuasan konsumen (IKK) atau Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atau atau indeks kepuasan pelanggan atau *Customer Satisfaction Index (CSI)*
- Indeks kepuasan stakeholders penerima manfaat program/kegiatan PPRPT merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan stakeholders yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat stakeholders dalam memperoleh manfaat produk/layanan dari hasil program/kegiatan yang dilakukan oleh PPRPT.
- Untuk melihat perkembangan manfaat (outcome) Ditjen PPRPT
- Semakin besar nilai indeks kepuasan stakeholders maka semakin tinggi tingkat kepuasan stakeholders, artinya produk/layanan yang diberikan Ditjen PPRPT semakin besar manfaat (outcome) yang diterima oleh stakeholders.

Contoh Fungsi Indeks Kepuasan :

$$IKK = \frac{IK}{III}$$

dengan:

IKK = Indeks Kepuasan Konsumen

IH = Indeks Harapan

IK = Indeks Kinerja

$$IH = \frac{\sum \bar{h}_i B_i}{\sum B_i}$$

dengan:

\bar{h}_i = Rata-rata tingkat kepentingan pada atribut ke-i

B_i = Penimbang atribut faktor ke-i

$$IK = \frac{\sum \bar{k}_i B_i}{\sum B_i}$$

dengan:

\bar{k}_i = Rata-rata tingkat kepuasan pada atribut ke-i

B_i = Penimbang atribut faktor ke-i



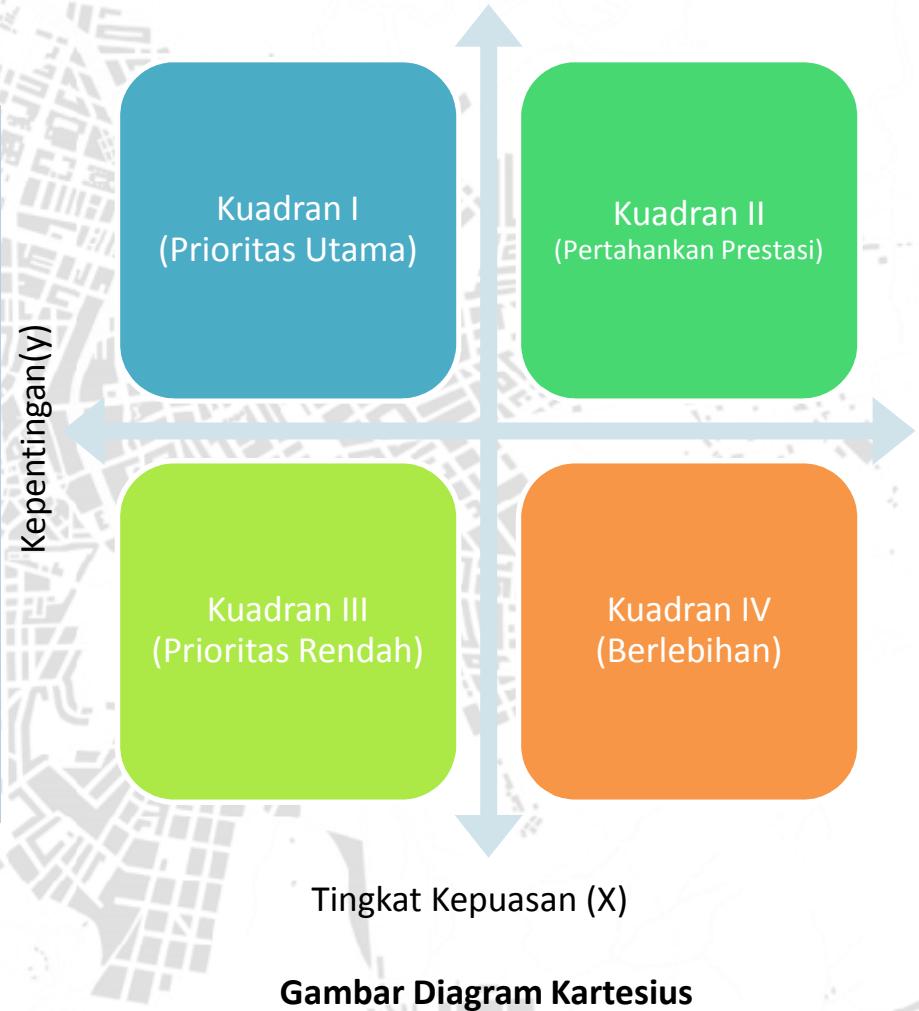
Indeks Kepuasan Konsumen

- Nilai Interval Konversi IKM 16,67-37,49 artinya kinerja manfaat (outcome) produk/layanan Tidak Baik;
- Nilai Interval Konversi IKM 37,50-58,32 artinya kinerja manfaat (outcome) produk/layanan Kurang Baik;
- Nilai Interval Konversi IKM 58,33-79,16 artinya kinerja manfaat (outcome) produk/layanan Baik;
- Nilai Interval Konveksi IKM 79,17-100,00 artinya kinerja manfaat (outcome) produk/layanan Sangat Baik



Importance Performance Analysis

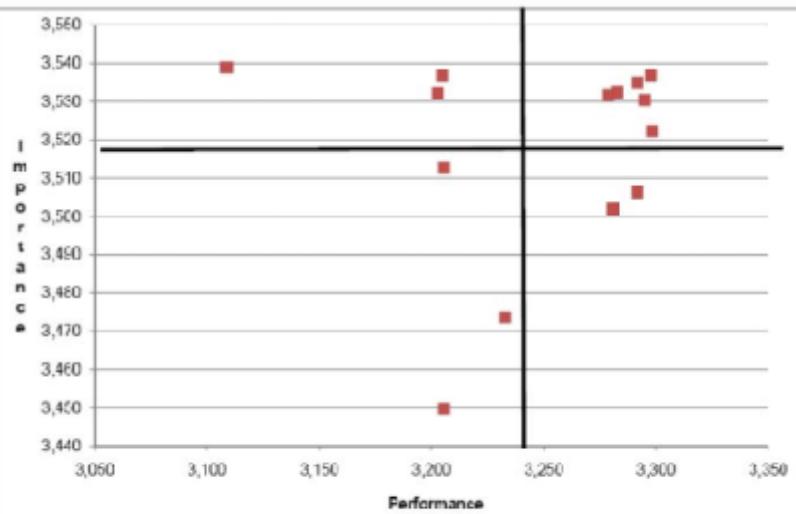
- Digunakan untuk mengetahui kesenjangan antara kinerja dengan harapan dari produk layanan dan *Customer Satisfaction Index* yang digunakan untuk menganalisis tingkat kepuasan pelanggan secara keseluruhan. Salah satu metode IPA adalah analisis kuadran.
- Melalui analisis kuadran dapat diketahui respon konsumen terhadap produk layanan yang diplotkan berdasarkan tingkat kepentingan dan kinerja dari produk layanan tersebut



Contoh hasil analisis Indeks Kepuasan Konsumen

Tabel 2. Rata-Rata Kepuasan dan Harapan Serta Indeks Kepuasan Konsumen Terhadap Kualitas Layanan BPS

Hal yang dinilai	Rata-rata Kepuasan	Rata-rata Harapan	Indeks Kepuasan
Persyaratan pelayanan terpublikasi atau terpampang pada tempat yang mudah terlihat dengan bahasa yang mudah dipahami sesuai dengan jenis pelayanan	2.84	3.47	2.84
Persyaratan untuk mendapatkan pelayanan mudah dipenuhi	2.95	3.42	2.95
Informasi mengenai prosedur pelayanan terpublikasi atau terpampang pada tempat yang mudah terlihat dapat diketahui oleh seluruh pengguna layanan	2.92	3.55	2.92
Alur dari prosedur pelayanan jelas	2.87	3.50	2.87
Waktu pelaksanaan layanan terpublikasi atau terpampang pada tempat yang mudah terlihat	2.97	3.47	2.97
Waktu pelaksanaan layanan sesuai dengan waktu layanan	2.76	3.39	2.76
Target waktu penyelesaian layanan terpublikasi atau terpampang pada tempat yang mudah terlihat	2.84	3.42	2.84
Pelayanan selesai sesuai dengan target waktu penyelesaian layanan	2.87	3.45	2.87
Biaya atau tarif pelayanan diinformasikan dengan jelas dan dapat diakses dengan mudah oleh pengguna layanan	2.95	3.47	2.95
Petugas pelayanan tersedia dalam jumlah yang memadai/seimbang dengan jumlah konsumen	2.71	3.37	2.71
Mudah bertemu dan berkomunikasi dengan petugas pelayanan	2.84	3.47	2.84
Petugas pelayanan menunjukkan sikap siap, cepat, dan cekatan dalam melayani	2.89	3.47	2.89
Petugas pelayanan mampu memberikan solusi pada setiap permasalahan konsumen	2.82	3.47	2.82
Pelaksanaan layanan sesuai dengan maklumat/janji pelayanan yang ditetapkan	2.87	3.47	2.87
Ruang pelayanan nyaman bagi konsumen	2.89	3.47	2.89
Ketersediaan fasilitas pendukung di ruang pelayanan BPS seperti sarana internet (wifi)	2.66	3.45	2.66
Kemasan produk layanan rapi dan formal	2.82	3.42	2.82



Importance Performance Analysis

Metode Analisis Data Kualitatif



- Studi kasus: Program/kegiatan
- Metode pengumpulan data: Wawancara mendalam (*In-depth interview*) dengan perangkat form wawancara semi terstruktur kepada informan kunci dan Focus Group Discussion (FGD)
- Teknik analisis: konten (*content analysis*) dan pengkodean terbuka (*open coding*)



Maksud dan Tujuan FGD

Maksud

Mendapatkan masukan dan saran perihal manfaat program/kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah dari berbagai stakeholders

Tujuan

- Mendapatkan penilaian manfaat program/kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah dari berbagai stakeholders → pengisian kuisioner, diskusi dan wawancara
- Mendapatkan permasalahan terkait pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah → diskusi dan pengisian daftar inventarisasi masalah
- Mendapatkan pandangan-pandangan dari berbagai stakeholders dan berdiskusi untuk menghasilkan suatu solusi perbaikan program/kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah → diskusi



Agenda FGD

Waktu	Kegiatan	Narasumber	PIC
10.15 – 10.45	Peran Pengendalian dan Penertiban Pemanfaatan Ruang di Provinsi Banten	Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Moderator
10.45 – 11.15	Solusi Peningkatan Efektifitas dan Manfaat (Outcome) Program/Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Kaprodi/Pakar/Pemerhati/Peneliti Bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah, Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Institut Teknologi Indonesia (ITI) Serpong	Moderator
11.15 – 12.00	Diskusi dan Tanya Jawab		Moderator
12.00 – 14.00		ISHOMA	
14.00 – 14.30	Manfaat Program/Kegiatan dari Ditjen PPRPT, permasalahan, dan solusi berdasarkan pengalaman Seksi Pengendalian Pertanahan Kanwil AT R/BPN di Provinsi Banten	Kepala Bidang Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten	Fasilitator
14.30 – 15.00	Tantangan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah terhadap Penyediaan Perumahan di Provinsi Banten	Ketua DPD REI Banten	Moderator
15.00 – 15.45	Diskusi dan Tanya Jawab		Moderator
15.45 – 16.00		Coffee Break	

Desk I : Pengendalian dan Penertiban Pemanfaatan Ruang



Agenda:

Pengisian kuesioner Persepsi Stakeholder terhadap Capaian Outcome Pengendalian dan Penertiban Pemanfaatan Ruang

Pimpinan/Moderator :

- Ariodilah Virgantara, ST,MT (Kepala Bagian Program dan Hukum, Setditjen PPRPT)
- Kepala Bidang Penataan Ruang, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Provinsi Banten
- Dr. Ir. Sadaryuni Rahardjo, M.T

Peserta:

- Kabid Penataan Ruang, Dinas PUPR, Kab. Lebak
- Kabid Penataan Ruang, Dinas PUPR, Kab. Pandeglang
- Kabid Penataan Ruang, Dinas PUPR, Kab. Serang
- Kabid Penataan Ruang, Dinas Tata Ruang dan Bangunan, Kab. Tangerang
- Kabid Penataan Ruang, Dinas PUPR, Kota Serang
- Kabid Penataan Ruang, Dinas PUPR, Kota Tangerang
- Kabid Penataan Ruang, Dinas Bangunan dan Penataan Ruang, Kota Tangerang Selatan

- PPNS Bidang Penataan Ruang, Kab. Lebak
- PPNS Bidang Penataan Ruang, Kab. Pandeglang
- PPNS Bidang Penataan Ruang, Kab. Serang
- PPNS Bidang Penataan Ruang, Kab. Tangerang
- PPNS Bidang Penataan Ruang, Kota Serang
- PPNS Bidang Penataan Ruang, Kota Tangerang
- PPNS Bidang Penataan Ruang, Kota Tangerang Selatan
- Kaprodi/Pakar/Pemerhati/Peneliti Bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah, Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Institut
- Teknologi Indonesia (ITI) Serpong
- Ketua IAP Provinsi Banten

Contoh Pertanyaan Kuisioner terkait Pengendalian Pemanfaatan Ruang



Apakah peraturan/NSPK bidang pengendalian pemanfaatan ruang telah diimplementasikan di daerah (peraturan menteri tentang pemantauan dan evaluasi, audit PPNS, dan PPNS penataan ruang)?

- a. Sangat dimanfaatkan
- b. Dimanfaatkan
- c. Cukup Dimanfaatkan
- d. Belum dimanfaatkan

Masukan dan saran perbaikan terkait peraturan/NSPK bidang pengendalian pemanfaatan ruang yang telah disusun?

.....
.....

Apakah pembinaan pengendalian pemanfaatan ruang mampu meningkatkan kapasitas stakeholders di daerah dalam mengendalikan pemanfaatan ruang?

- a. Sangat meningkatkan kapasitas
- b. meningkatkan kapasitas
- c. kurang meningkatkan kapasitas
- d. tidak meningkatkan kapasitas

Apa saran-saran untuk memperbaiki mutu pembinaan pengendalian pemanfaatan ruang

.....
.....

Desk 2 : Pengendalian Pertanahan dan Tanah Terlantar



Agenda:

Pengisian kuesioner Persepsi Stakeholder terhadap Capaian Outcome Pengendalian Pertanahan dan Pendayagunaan Tanah Terlantar

Pimpinan/Moderator :

- Kepala Bidang Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten
- Prasetyo Wiranto, ST, M.Sc (Kasubbag Evaluasi Kinerja)

Peserta:

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan, Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak• Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan, Kantor Pertanahan Kab. Pandeglang• Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan, Kantor Pertanahan Kabupaten Serang• Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan, Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang | <ul style="list-style-type: none">• Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan, Kantor Pertanahan Kota Cilegon• Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan, Kantor Pertanahan Kota Serang• Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan, Kantor Pertanahan Kota Tangerang• Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan, Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan• DPD REI |
|--|--|

Contoh Pertanyaan Kuisioner terkait Pengendalian Penguasaan Tanah



Seberapa berguna Rekomendasi Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pemegang Hak Atas Tanah dan Dasar Penguasaan Atas Tanah Non Pertanian?

- Sangat Berguna b. Berguna c. Tidak Berguna d. Sangat Tidak Berguna

Apa manfaat dari hasil program/kegiatan penyusunan Rekomendasi Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pemegang Hak Atas Tanah dan Dasar Penguasaan Atas Tanah Non Pertanian?

.....
.....

Berapa persen penangan tanah terlantar yang sudah dilakukan ?

- a. Lebih dari 50% b. 50 % tertangani c. Kurang dari 50% d. Belum tertangani

Bagaimana tantangan dan kesulitan penanganan tanah terlantar di daerah anda ?

.....
.....

LAMPIRAN

FGD II Sulawesi Selatan : Makassar

Selasa, 15 Mei 2018

